



Determinan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Utara

Riswa Holamita Siregar¹, Ratna Sari Dewi², Ardhansyah Putra Harahap³

^{1,2,3} Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah

Corresponding Author :  riswaiswa@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera utara. Yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah, posisi keuangan, kinerja keuangan dan opini audit. Sampel pada penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten/kota yang merupakan daerah pemekaran dibawah tahun 2000 dan yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 20 kabupaten/kota di provinsi sumatera utara pada tahun 2018-2020. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keuangan berpengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera utara diterima. Sedangkan kemandirian keuangan daerah, kinerja keuangan dan opini audit berpengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera utara ditolak.

Keywords

Kemandirian Keuangan Daerah, Posisi Keuangan, Kinerja Keuangan, Opini Audit, Ketepatan Waktu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sumatera Utara



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sebelum laporan keuangan pemerintah diterbitkan, laporan keuangan tersebut diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menilai kewajarannya. Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Laporan Keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menyampaikan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 2 bulan setelah Laporan Keuangan diterima.

Selanjutnya laporan keuangan tersebut dapat segera dipublikasikan kepada masyarakat umum, karena pengguna laporan keuangan tersebut tidak hanya DPRD atau pemerintah saja. Dijelaskan dalam SAP bahwa pengguna laporan keuangan adalah a) masyarakat; b) wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa; c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan d) pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan selain penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu kepada DPRD, publikasi laporan keuangan kepada masyarakat umum juga menjadi suatu yang penting (Dimas H.M Putro, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa daerah harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Keuangan daerah kepada Pemerintah. Informasi yang disampaikan mencakup:

1. APBD dan realisasi APBD
2. Neraca daerah
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan
5. Dana dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantu
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Informasi Keuangan daerah disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Jika Pemerintah Daerah tidak menyampaikan informasi Keuangan daerah maka Menteri Keuangan akan menerbitkan peringatan tertulis. Jika Pemerintah Daerah dalam waktu 30 hari setelah penerbitan peringatan tertulis tidak menyampaikan informasi, Menteri Keuangan akan memberikan sanksi berupa penundaan aliran dana perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (PP No. 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 56 Tahun 2005).

Kerangka Teori

Agency Theory

Konsep teori keagenan (*agency theory*) R.A Supriono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori

keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Pengertian Laporan Keuangan

PSAK No.1 (2015:1) laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. PSAK No.1 (2015:2) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan integral dari laporan keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Kasmir (2014:10) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan dibagi menjadi tujuh, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu

Pengguna Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat karena ia dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penggunaannya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Laporan keuangan disajikan kepada pihak yang berkepentingan termasuk manajemen, kreditur, pemerintah dan pihak lain-lainnya. Berikut pengguna laporan keuangan menurut Martani (2012:33), yaitu:

1. Investor
2. Karyawan
3. Pemberi jaminan

Pengertian Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa, pemerintah daerah adalah kepala

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah sendiri dapat dipahami sebagai perangkat daerah untuk menjalankan dan menyelenggarakan jalannya pemerintah. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa fungsi pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

3. Jenis-Jenis Perangkat Daerah

Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan (PP RI No.18 Tahun 2016).

Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap pemerintah wajib menyusun laporan keuangan karena laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan gambaran kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan pada instansi pemerintah sama halnya dengan perusahaan pada umumnya terdapat beberapa jenis laporan keuangan.

Jenis-jenis laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Posisi Keuangan

4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PSAP No.1 secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan laporan keuangan menurut Mardiasmo (2018:161) sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*) laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah disepakati.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektik (*accountability and retrospective reporting*) laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain sejenis jika ada.

Pengertian Audit Sektor Publik

Audit terhadap institusi sektor publik menjadi terasa penting saat baru disadari bahwa lembaga eksekutif sebagai pihak yang mengelola uang negara yang merupakan uang rakyat, uang orang banyak, perlu untuk dipertanggung jawabkan penggunaannya dan perlu diperiksa kewajarannya. Audit terhadap sektor publik menjadi fokus perhatian karena dinilai instansi pemerintah tidak terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya dan instansi sektor publik rawan akan penyalahgunaan dana sehingga dibutuhkan aturan yang ketat dan audit yang independen terhadap pemeriksaan laporan keuangan instansi pemerintah. Audit terhadap sektor publik sangat penting dilakukan, hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sektor publik (pemerintah pusat dan daerah) untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat diketahui pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar atau tidak (Anis, 2014:9).

Ketepatan Waktu

Laporan keuangan sektor pemerintahan berfungsi untuk memberikan informasi relevan tentang posisi keuangan dari seluruh transaksi selama satu periode, hal tersebut dinyatakan dalam SAP (Dadang, 2014). Ketepatan waktu

dalam publikasi laporan keuangan merupakan faktor yang harus diperhatikan sebagai pendukung dan penguat relevansi agar laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan oleh pengguna baik pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini memberikan keyakinan bahwa ketepatan waktu suatu entitas kepada para penggunanya itu merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suatu entitas kepada penggunanya.

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 Provinsi, 25 Kabupaten dan 8 Kota.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti, antara lain:

1. Pemerintah daerah yang menyampaikan laporan keuangan kepada BPK
2. Daerah penekaran dibawah tahun 2000

Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas atau *independent variabel* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2018:69). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah :

X1 : Kemandirian keuangan daerah

X2 : Posisi keuangan

X3 : Kinerja keuangan

X4 : Opini audit

Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat atau *dependent variabel* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018:69). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah :

Y : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap kemandirian keuangan daerah (X1) menunjukkan nilai minimum 0,00 nilai maksimum 72,55 dengan rata-rata sebesar 8,11 dan standar deviasi sebesar 9,23. Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap posisi keuangan (X2) menghasilkan

nilai minimum sebesar 1,22 nilai maximum sebesar 7,2 dengan rata-rata sebesar 2,20 dan standar deviasi sebesar 1,16. Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap kinerja keuangan (X3). menghasilkan nilai minimum sebesar (-0,16) nilai maximum sebesar 1,31 dengan rata-rata sebesar 0,05 dan standar deviasi sebesar 0,17. Selanjutnya opini audit (X4) juga dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,61 dan standar deviasi 0,49.

Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2Log Likelihood* (-2LL). Pada awal (*Block Number* =0) dengan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada akhir (*Block Number* =1). Nilai -2LL awal adalah sebesar 56,343. Setelah dimasukkan keempat variabel independen, maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi 44,228. Penurunan *Likelihood* (-LL) sebesar 12,115 ini menunjukkan model regresi yang lebih baik

Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R & Square. Nilai R Square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 213:247).

Hosmer and Lemeshow Test

Dari hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 5,153 dengan *df* = 8 memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari α ($0,741 > 0,05$), menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan signifikan antara model dengan nilai yang diolah (observasi), sehingga model regresi ini dikatakan baik dan bisa dilakukan untuk analisis selanjutnya.

Matriks klasifikasi

Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah adalah sebesar 95,7%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan, terdapat sebanyak 57 laporan keuangan pemerintah daerah yang diprediksi akan melakukan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dari total 60 laporan keuangan pemerintah daerah.

Analisis Regresi Logistik yang Terbentuk

Hasil pengujian terhadap model regresi menghasilkan model berikut ini :
$$Y = (-4,289) + 0,112 X_1 + 2,104 X_2 + 9,822 X_3 + 1,244 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (diberi nilai 1 jika tepat waktu dan tidak tepat waktu diberi nilai 0)

α : Konstanta

X1 = Kemandirian Keuangan Daerah

X2 : Posisi Keuangan Daerah

X3: Kinerja Keuangan Daerah

X4 : Opini Audit

e : Residu

KESIMPULAN

Penelitian ini mencoba menguji bagaimana determinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi sumatera utara. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Keempat variabel independen tersebut adalah kemandirian keuangan, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan opini audit.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 30%, sedangkan sisanya sebesar 70% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.
2. Variabel Dependen dan Independen berkorelasi dengan baik, Artinya jika salah satu variabel meningkat maka variabel lainnya juga ikut meningkat.
3. Hasil hipotesis yang menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan daerah ditolak.
4. Hasil hipotesis yang menyatakan bahwa Posisi Keuangan (X2) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan daerah diterima.
5. Hasil hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja keuangan (X3) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah ditolak.
6. Hasil hipotesis Opini Audit (X4) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan daerah ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng, Abdul.H. 2018. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka Jawa Barat*
- Anis, Muhammad. 2014. *Audit Sektor Publik*. Yogyakarta :Interpena

- Astrawan, K. P, dkk. 2016. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internasional Dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng
- Antin, Okfitasari, dkk. 2020. Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Di Indonesia
- Attarie, P. N. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)
- Dadang, Suwanda. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Eristanti. Baiq. DA, dkk. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Vol. 1(2)
- Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan: Brama Ardian
- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisa *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi Ketiga. UPP SMP YKPN
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Teori Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta:Bumi Aksara